

STUDI KASUS MALPRAKTEK DOKTER DI RUMAH SAKIT (PERKARA PERDATA NOMOR 57 PK/PDT/2021 DAN PERKARA PERDATA NOMOR 1145 K/PDT/2017)

Siti Rokayah

*Program studi magister hukum pada Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta
sitirokayah@gmail.com*

ABSTRAK

Dokter, dokter gigi, Pasien dan Rumah sakit masing-masing memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun tidak dapat dipungkiri bila dokter dan dokter gigi dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit dalam penyelengaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan tidak jarang ditemukan adalah pelanggaran, kesalahan atau kelalaian terhadap pasien yang pada umumnya dikenal dengan malpraktek dokter. Tidak jarang bila terjadi dugaan malpraktek dokter di rumah sakit timbul tuntutan ganti rugi secara perdata dari pasien yang merasa dirugikan atas pelayanan medis dari dokter/dokter gigi melalui pengajuan gugatan secara perdata ke pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak yuridis Putusan Perkara Perdata Nomor 57 PK/Pdt/2021 *juncto* Nomor 42 K/PDT/2018 *juncto* Nomor 614/PDT/2016/PT.DKI *juncto* 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT dan Putusan Perkara Perdata Nomor 1145 K/PDT/2017 *juncto* Nomor 123/PDT/2016/PT.DKI *juncto* Nomor 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. terhadap malpraktek dokter di rumah sakit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mempergunakan berbagai sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dijadikan basis data. Data yang diperoleh dipelajari serta dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif yang menghasilkan data normatif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dapat mengetahui dampak yuridis Putusan Perkara Perdata Nomor 57 PK/Pdt/2021 *juncto* Nomor 42 K/PDT/2018 *juncto* Nomor 614/PDT/2016/PT.DKI *juncto* 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT dan Putusan Perkara Perdata Nomor 1145 K/PDT/2017 *juncto* Nomor 123/PDT/2016/PT.DKI *juncto* Nomor 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. terhadap malpraktek dokter di rumah sakit dan bahwasannya masih belum terdapat standar baku atau pedoman baku yang secara khusus dalam bidang kesehatan bagi hakim dalam memutuskan perkara malpraktik dokter di rumah sakit. Saran dalam penelitian ini menuntut dokter dan rumah sakit melaksanakan kewajiban dengan baik dalam memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Begitu pula dengan rumah sakit, dapat dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit guna mengurangi atau setidaknya tidak lagi ada malpraktek dokter di rumah sakit sehingga terhindar tuntutan ganti rugi dari pasien dan atau keluarga pasien.

Kata Kunci : malpraktek, dokter, rumah sakit

**CASE STUDY OF DOCTOR'S MALPRACTICE IN HOSPITAL (CIVIL
CASE NUMBER 57 PK/PDT/2021 AND CIVIL CASE NUMBER 1145
K/PDT/2017)**

Siti Rokayah

Master of Law Study Program at the University of National Development "Veteran" Jakarta
sitirokayah@gmail.com

ABSTRACT

Doctors, dentists, patients and hospitals each have the right to obtain legal protection. However, it is undeniable that doctors and dentists in carrying out health services and hospitals in providing medical treatment and health restoration services are often found to be violations, errors or omissions against patients which are generally known as malpractice. Not infrequently when there is an alleged malpractice of a doctor in a hospital, a claim for civil compensation arises from a patient who feels aggrieved by medical services from a doctor/dentist through filing a civil lawsuit to the court. The purpose of this study was to determine the juridical impact of the Decision on Civil Case Number 57 PK/Pdt/2021 juncto Number 42 K/PDT/2018 juncto Number 614/PDT/2016/PT.DKI juncto 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT and Decision on Civil Case Number 1145 K/PDT/2017 in conjunction with Number 123/PDT/2016/PT.DKI in conjunction with Number 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. against malpractice of doctors in hospitals. The type of research used is normative legal research, which uses various sources of primary, secondary and tertiary legal materials that are used as databases. The data obtained are studied and discussed as a comprehensive material that produces qualitative normative data. The results of this study are able to determine the juridical impact of the Decision on Civil Case Number 57 PK/Pdt/2021 juncto Number 42 K/PDT/2018 juncto Number 614/PDT/2016/PT.DKI juncto 625/Pdt.G/2014/PN.JKT. BRT and Civil Case Decision Number 1145 K/PDT/2017 in conjunction with Number 123/PDT/2016/PT.DKI in conjunction with Number 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. against malpractice of doctors in hospitals and that there is still no standard or standard guideline specifically in the health sector for judges in deciding cases of malpractice of doctors in hospitals. Suggestions in this study require doctors and hospitals to carry out their obligations properly in providing medical services in accordance with professional standards and standard operating procedures as well as the medical needs of patients. Likewise, hospitals can carry out medical treatment and health recovery services in accordance with hospital service standards in order to reduce or at least no longer have malpractice doctors in hospitals so as to avoid claims for compensation from patients and or patients' families.

Keywords: *malpractice, doctor, hospital*